

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kolaborasi Governance dalam Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu

Kolaborasi governance dalam pengembangan pariwisata Bledug Kuwu Kabupaten Grobogan berangkat dari (1) Kondisi awal yang menunjukkan sudah baik, walaupun dalam pengembangannya masih menghadapi tantangan koordinasi, pemahaman, dan partisipasi, sehingga memerlukan kolaborasi holistik untuk keberlanjutan. (2) Desain kelembagaan yang sudah berjalan masih membutuhkan strategi yang komprehensif, melibatkan identifikasi semua pemangku kepentingan, melakukan koordinasi efektif, pemahaman visi bersama, pengelolaan ego sectoral dari masing-masing stakeholder, dan juga penyelarasan regulasi. (3) Kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, pengembangan infrastruktur wisata, dan kebijakan partisipatif, meskipun keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. (4) Proses kolaborasi dalam pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan dilakuka dengan mengadakan dialog rutin, transparansi pengelolaan, pemahaman bersama, komitmen kolektif, dan orientasi *win-win solution* untuk sinergi berkelanjutan.

4.1.2 Faktor Penghambat dalam mewujudkan Kolaborasi Pengembangan

Obyek Wisata Bledug Kuwu

Faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan kolaborasi pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, (1) Pengelola Wisata Bledug Kuwu masih mengalami keterbatasan anggaran. Hambatan anggaran tersebut diatasi melalui diversifikasi pendanaan, efisiensi pengeluaran, kerjasama eksternal, dan prioritas pengembangan sarana prasarana, meski keberlanjutannya tetap menjadi tantangan. (2) Minimnya CSR dari pihak swasta, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan berencana mengintegrasikan CSR dengan kolaborasi multi-stakeholder, meskipun menghadapi tantangan partisipasi, koordinasi, sumber daya, regulasi, dan keberlanjutan program. (3) Pengelola Bledug Kuwu mengatasi kekurangan media promosi dengan meningkatkan promosi online melalui media sosial, berkolaborasi dengan instansi terkait, dan bekerja sama dengan agen perjalanan untuk memperluas jangkauan. (4) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap wisata menghambat pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu, namun pengelola berusaha melalui advokasi dan membangun hubungan untuk memperoleh dukungan yang lebih besar. Perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan ini dan memperkuat faktor pendorong guna meningkatkan pengembangan pariwisata secara holistik dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Grobogan, memberikan masukan terkait kebutuhan lokal, serta menjaga daya tarik wisata. Pengelola wisata perlu meningkatkan transparansi penggunaan dana, merencanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk manfaat masyarakat, dan mengembangkan strategi promosi wisata yang komprehensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Dinas Pariwisata perlu memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan pemantauan program secara rutin. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur wisata, membuat regulasi yang mendukung industri pariwisata, dan bekerja sama dengan pengusaha untuk menarik investasi. Seluruh elemen terlibat diharapkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gunawan, R. M. B. (2021). GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)- Rajawali Pers. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Kurhayadi, Rohayati, Y., & Sucipto, B. (2020). Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. CV Insan Cendekia Mandiri.
- Mardawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyono, D., & Aristiani, R. (2020). *Penyusunan dan Analisis Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, P. U. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan*. Jakarta: UI Press.
- Manahati Zebua, M. (2018). *Pemasaran Pariwisata (Menuju Festival Sail Daerah)*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Mattessich, P.W., & Monsey, B.R. (1992). *Collaboration: What Makes It Work, A Review of Research Literature on Factors Influencing Succesful Collaboration*, St. Paul, MN: Amhert H. Wilder Foundation
- Nuraini, R. (2022). *Meningkatkan Komitmen Organisasi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Nurdin, A. (2020). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, D. A. (2017). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Andi Publisher
- Pratama, A. (2023). *Membangun Konsistensi Diri*. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, S. (2020). *Promosi yang Efektif untuk Meningkatkan Penjualan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Martani, D. (2022). *Konsep dan Aplikasi Penganggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawan, A. (2021). *Membangun Kepercayaan dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi, A. (2015). *Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang*. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Suryanto, A. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Winarno, B. (2018). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.

JURNAL

- Antara, M., & Arida, N. S. (2015). Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. *Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana*.
- Ariyanto (2020). Dampak Corporate Social Responsibility dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,
- Ayu, I. K. (2019). Menngembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*.
- Ansell, Chris and Alison Gash (2008), Collaborative governance in theory and practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*, **18** (4), 543–571.
- Agustina, L., Abdullah, T., & Saputra, M.E. (2019). Implementasi Teori Stakeholder dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, *23*(1), 1-12.
- Anggraini, D. & Farida, N. (2018). Strategi Promosi Produk Melalui Media Sosial. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, *5*(2), 126-135.
- Bawole, P. (2020). Pengembangan kampung kota sebagai salah satu alternatif tujuan wisata minat khusus. *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur*.
- Budiani, et al. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas. *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 32, No. 2
- Burhanuddin. (2016). Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal EduTech*.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*.
- Dina Agustina (2018). *Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *9*(1), 87–103
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*.
- Farhan, A. (2018). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *Journal of Politic and*

Government Studies.

- Gash, A. (2022). Collaborative governance. *Handbook on Theories of Governance*.
- Gunawan, A. I., & Yana, E. (2016). Analisis Deskriptif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Menerapkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Cirebon. *Seminar Nasional Pendidikan Serentak Se-Indonesia*.
- Harahap, Z., & Ritonga, A. K. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dalam Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*.
- Irham. (2019). Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). Collaborative governance in the united states and korea: Cases in negotiated policymaking and service delivery. *Iinternational Review of Public Administration*.
- Kasian, A. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DESA SELONG BELANAK, KABUPATEN LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*.
- Kurniasih, D.-. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*.
- Kutsiyah, F. (2019). Menumbuhkembangkan Destinasi Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Sapi Sonok di Pulau Madura. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*.
- Maharesti, W. S. (2018). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Manteiro, M. C. B. (2016). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis & Manajemen*.
- Nurlela, R., & Islahuddin, D. (2018). Corporate Social Responsibility: Telaah dengan Pendekatan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-12.
- Oktavianawati, L., & Sri, I. F. (2018). The Factors that Influence the Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 7(2), 119–126.

- Purbadi, Y. D., & Lake, R. C. (2019). Konsep Kampung-Wisata Sejahtera, Kreatif, Cerdas dan Lestari Berkelanjutan. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*.
- Pratama, A., & Rofiaty, R. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dalam Relationship Marketing. *Jurnal Manajemen*, 22(2), 271-282.
- Pratiwi, A., & Yulianto, I. (2018). Implementasi Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2), 21-37.
- Primadany,E, R et al. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4
- Ramadhana, A., & Martani, D. (2022). Meningkatkan Peran dan Tanggung Jawab Pegawai. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 16(2), 135-150.
- ROPIAH, E. S. (2018). Wisata Halal: Potensi Ekonomi Baru Industri Pariwisata Di Kabupaten Cirebon. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*.
- Safira, D.S., & Abdullah, T. (2021). Analisis Triple Bottom Line untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 12(2), 80-95.
- Safitri, D. (2019). Hubungan Peran dan Tanggung Jawab dengan Kinerja Karyawan. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 5(3), 200-210.
- Sari, D.P. (2018). Implementasi Transparansi dan Informasi Terbuka di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 159-166.
- Sari, D. P., & Suryani, N. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh. *Jurnal Geografi dan Sumber Daya Alam*, 14(2), 123–134.
- Sulistiyowati, P. (2017). Implementasi Anggaran dalam Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 56-66.
- Sahabudin, A. (2020). Tantangan Milenial Di Desa Wisata. *Tornare*.
- Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*.
- Seo, J.-H., Lee, B.-R., Kim, J.-H., & Kim, J.-J. (2012). Collaborative Process to Facilitate BIM-based Clash Detection Tasks for Enhancing Constructability. *Journal of the Korea Institute of Building Construction*.

- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Sudiarta, I, M, et al. (2021). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta. *Jurnal Manajemen dan Parowosata*. Vol. 8 No. 2
- Ugra, M. A., Rahu, S., & Suprayitno, S. (2021). Kolaborasi Pentahelix Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 6(4), 12598–12610.
- Widianti, A. K. (2017). Preservasi Rumah Adat Desa Sade Rembitan Lombok Sebagai Upaya Konservasi. *VITRUVIA: Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*.
- Witomo, C. M., & Ramadhan, A. (2018). POTENSI EKONOMI PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.
- Yun, B.-H., Jeong, S.-C., Oh, D.-J., & Lee, S.-S. (2020). A Study on the Process of Construction of Collaborative Governance and the Role of Participating Parties in Urban Regeneration Projects for Regional Problem Solving. *Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design*.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Teknik Pomits*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Interview Guide

Indikator	Fenomena	Pertanyaan
<i>Collaborative Governance menurut Ansell and Gash</i>	1. Kondisi Awal	1. Bagaimana kondisi Sumber daya yang ada pada lokasi wisata di dalam menunjang proses collaborative governance, dan kendala apa yang terjadi terkait Sumber daya Ketika akan melaksanakan Collaborative Governance?
		2. Bagaimana pengetahuan pemangku kepentingan terkait Collaborative Governance yang pernah dilaksanakan dimasa lalu? (apakah pernah terjadi konflik antar pemangku kepentingan Ketika melaksanakan proses collaborative) sehingga hal tersebut menyebabkan proses collaborative governance tidak berjalan dengan baik ataupun menimbulkan keraguan untuk para pemangku kepentingan.
	2. Desain kelembagaan	1. Bagaimana prosedur atau Langkah awal yang dilaksanakan pihak terkait demi berjalannya dengan baik proses collaborative governance?
		2. Apakah terdapat hambatan yang terjadi Ketika menentukan aturan awal sebelum proses collaborative governance dilaksanakan?
	3. Kepemimpinan fasilitas	1. Bagaimana proses para pemangku kepentingan dan masyarakat (pengunjung, masyarakat sekitar) terkait dengan adanya collaborative governance yang dilaksanakan di lokasi wisata tersebut?
		2. apakah kebijakan yang ditetapkan sebelum proses collaborative governance dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang dilibatkan?

	4. Proses Kolaborasi	1. bagaimana Langkah pemangku kepentingan dalam melaksanakan dialog tatap muka (pertemuan rutin) yang di upayakan dalam proses kolaborasi agar tetap terjaga dengan baik?
		2. bagaimana Langkah pemangku kepentingan dalam terus membangun kepercayaan di saat collaborative terlaksana, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berorientasi terhadap kegagalan dalam berkolaborasi?
		3. komitmen seperti apa yang menjadi tujuan para pemangku kepentingan kedepannya saat proses collaborative terlaksanakan?
		4. Langkah apa saja yang dilaksanakan pemangku kepentingan guna mencapai pemahaman Bersama antar pemangku kepentingan di saat proses collaborative terlaksana?
		5. Saat kesepakatan telah terlaksana, bagaimana Langkah para pemangku kepentingan untuk tetap konsisten terhadap suatu tujuan yang telah ditetapkan?

Lampiran 2

Surat Izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Sumarto
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\(at\)undip.ac.id](mailto:fisip(at)undip.ac.id)

Nomor : 00895/UN7.F7/PP/IX/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Disporabupar

Jl. Bhayangkara No.1, Kemas, Purwodadi,

Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan

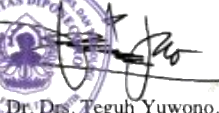
Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Pariwisata

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: GINA SETYANINGTYAS
Nomor Induk Mahasiswa	: 14020118140140
Judul	: Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Grobogan
Alamat Rumah	: Ds. Gundi RT01/RW01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
Alamat Email	: Gsetyaningtyas@gmail.com
Nomor Telepon	: 082236815906

Atas berkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 12 September 2024

Dekan


Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003